

**BAB IV**

**ANALISIS PENDAPAT M. QURAISH SHIHAB TENTANG DASAR  
SISTEM EKONOMI ISLAM**

Apabila memperhatikan dan mencermati pendapat Quraish Shihab sebagaimana tertuang dalam bab tiga skripsi ini, inti yang dapat dicatat dari seluruh uraiannya adalah M. Quraish Shihab menyatakan bahwa tidak semua persoalan ekonomi dirinci oleh al-Qur'an, karena persoalan ini berkembang dari masa ke masa. Atas dasar itu, al-Qur'an hanya memberi tuntunan umum, berupa prinsip-prinsip dasar yang dapat dijabarkan umat sepanjang masa sesuai dengan kebutuhan, kondisi sosial, dan perkembangan masyarakat. Kita dapat menyimpulkan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam pada keyakinan tauhid. Dari sinilah lahir prinsip-prinsip yang bukan saja dalam bidang ekonomi, tetapi juga menyangkut segala aspek kehidupan dunia dan akhirat.<sup>1</sup>

Pada buku lainnya M. Quraish Shihab menyatakan bahwa secara umum prinsip ekonomi Islam terangkum dalam empat prinsip pokok yaitu tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab.<sup>2</sup> Keempat prinsip sistem ekonomi Islam tersebutlah yang hendak dianalisis dan dibandingkan.

---

<sup>1</sup> M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi: Al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*, Jakarta: Lentera Hati, 2011, hlm. 197.

<sup>2</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2011, hlm. 409.

Islam sebagai agama Allah, mengatur kehidupan manusia baik kehidupan di dunia maupun akhirat. Perekonomian adalah bagian dari kehidupan manusia, maka tentulah hal ini ada dalam sumber yang mutlak yaitu Al-Qur'an dan As-Sunah, yang menjadi panduan dalam menjalani kehidupan. Kedudukan sumber yang mutlak ini menjadikan Islam sebagai suatu agama yang istimewa dibandingkan dengan agama lain sehingga dalam membahas perspektif ekonomi Islam segalanya bermuara pada akidah Islam berdasarkan Al-Qur'an al Karim dan As-Sunah Nabawiyah.<sup>3</sup>

Ekonomi Islam secara mendasar berbeda dari sistem ekonomi yang lain dalam hal tujuan, bentuk, dan coraknya. Sistem tersebut berusaha memecahkan masalah ekonomi manusia dengan cara menempuh jalan tengah antara pola yang ekstrem yaitu kapitalis & komunis. Singkatnya, ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasar pada Al-Qur'an & Hadis yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia di dunia dan akhirat (*al-Falah*). Ada tiga asas filsafat ekonomi Islam, yaitu:

1. Semua yang ada di dalam alam semesta ini adalah milik Allah SWT, manusia hanyalah khalifah yang memegang amanah dari Allah untuk menggunakan milik-Nya. Sehingga segala sesuatunya harus tunduk pada Allah sang pencipta dan pemilik. Firman Allah dalam QS. an-Najm: 31:

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا  
وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى (النجم: 31)

Artinya: "Dan hanya kepunyaan Allahlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya Dia memberi balasan kepada orang-

---

<sup>3</sup> Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 3

orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga)" (QS. an-Najm: 31).<sup>4</sup>

2. Untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai khalifah Allah, manusia wajib tolong-menolong dan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah.<sup>5</sup>
3. Beriman kepada hari kiamat, yang merupakan asas penting dalam suatu sistem ekonomi Islam karena dengan keyakinan ini tingkah laku ekonomi manusia akan dapat terkendali sebab ia sadar bahwa semua perbuatannya akan dimintai pertanggungjawaban kelak oleh Allah SWT. Selain dari asas filsafat tersebut di atas, ekonomi Islam juga memiliki nilai-nilai tertentu, yaitu:

1. Nilai asar kepemilikan, menurut sistem ekonomi Islam:

- a. Kepemilikan bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi sedap orang atau badan dituntut kemampuannya untuk memanfaatkan sumber-sumber ekonomi tersebut.
- b. Lama kepemilikan manusia atas sesuatu benda terbatas pada lamanya manusia tersebut hidup di dunia.
- c. Sumber daya yang menyangkut kepentingan umum atau yang menjadi hajat hidup orang banyak harus menjadi milik umum. Hal ini berdasarkan Hadist Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Ahmad & Abu Daud yang mengatakan: "Semua orang berserikat

---

<sup>4</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama 1986, hlm. 760.

<sup>5</sup> Nurul Huda, *op.cit.*, hlm. 4.

mengenai tiga hal, yaitu air (termasuk garam), rumput, dan api".  
Sumber alam ini dapat dikiasikan (sekarang) dengan minyak dan gas bumi, barang tambang dan kebutuhan pokok manusia lainnya.

## 2. Keseimbangan

Keseimbangan yang terwujud dalam kesederhanaan, hemat, dan menjauhi sikap pemborosan. Seperti yang terdapat dalam QS. al-Furqan: 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا  
(الفرقان: 67)

Artinya: "Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta) mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian" (QS. al-Furqan: 67).<sup>6</sup>

Selain itu, Firman Allah dalam QS. ar-Rahman: 9:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (الرحمن: 9)

Artinya: "Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu".

## 3. Keadilan

Keadilan di dalam Al-Qur'an, kata adil disebutkan lebih dari seribu kali, setelah perkataan Allah dan ilmu pengetahuan. Nilai keadilan sangat penting dalam ajaran Islam, terutama dalam kehidupan hukum sosial, politik dan ekonomi. Untuk itu keadilan harus diterapkan dalam kehidupan ekonomi seperti proses distribusi, produksi, konsumsi, dan lain sebagainya. Keadilan juga harus

<sup>6</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 530.

diwujudkan dalam mengalokasikan sejumlah hasil kegiatan ekonomi tertentu bagi orang yang tidak mampu memasuki pasar, melalui zakat, infak, dan hibah.

Selain dari ketiga nilai tersebut diatas, Islam memiliki nilai instrumental yang mempengaruhi tingkah laku ekonomi seorang muslim dan masyarakat pada umumnya. Adapun nilai instrumental tersebut adalah zakat, larangan riba, kerja sama ekonomi, dan jaminan sosial. Jika nilai instrumental ini dilaksanakan, maka akan terwujud sistem ekonomi yang seimbang, menguntungkan, dan menyejahterakan semua pihak.<sup>7</sup>

Sebagai sebuah cara hidup yang serba-cukup, Islam menyediakan segala aspek eksistensi manusia. Ia mengupayakan sebuah tatanan yang didasarkan pada seperangkat konsep yang saling berkait tentang Tuhan, manusia, hubungan manusia dengan Tuhan, kedudukan dan peranan manusia di alam semesta, dan hubungannya dengan sesama manusia.

Kedudukan ekonomi menempati kedudukan yang istimewa. Islam yakin bahwa stabilitas keseluruhan bergantung pada kesejahteraan material dan spiritual manusia. Kedua aspek ini berpadu dalam bentuk manunggal dalam setiap tindakan dan kebutuhan manusia.

Perhatian Islam pada kedua aspek dalam eksistensi manusia itu menghindarkan kaum Muslim dari sikap pasif dan pasrah diri tanpa usaha. Kaum muslim diharuskan aktif, kreatif dan produktif dalam ikhtiar-ikhtiar ekonomi mereka. Ada korelasi positif antara kesalihan dan produktivitas

---

<sup>7</sup> Nurul Huda, *op.cit.*, hlm. 5.

dalam Islam. Pandangan tentang kehidupan dunia yang jelas positif dan secara sosial interaktif ini, memberi manusia suatu kewajiban sosio-ekonomi yang tegas, dan kinerja dari pelaksanaan kewajiban ini menentukan spiritualitasnya. Sesungguhnya, Islam memperlihatkan suatu keistimewaan yang lebih besar pada pengupayaan material dengan spiritual dan etika, dibanding pada penundukan kebutuhan-kebutuhan material manusia terhadap pengutamaan urusan-urusan spiritualnya.

Semenjak awal sejarah Islam, tidak hentinya diulang bahwa prinsip yang paling pokok dari tata sosial Islam adalah penciptaan keadilan ekonomi. Keadilan ekonomi mengimplikasikan perwujudan sejumlah tujuan. Pelenyapan kemiskinan absolut merupakan tujuan yang utama. Setiap orang harus berpartisipasi dan memberikan sumbangan untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang bergantung kepadanya. Kemudian, peluang-peluang ekonomi harus terbuka bagi partisipasi setiap orang. Jika individu diharuskan kreatif dan imajinatif, masyarakat secara kolektif harus mendukung.<sup>8</sup>

Keadilan ekonomi dapat berjalan di suatu lingkungan di mana keputusan individu dipandang sebagai inisiatif yang utama. Kebebasan untuk memutuskan dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang dituntun oleh prinsip-prinsip agama merupakan prasyarat bagi keadilan ekonomi. Pemerintah (atau otoritas kolektif) memberikan pedoman-pedoman umum dan membatasi praktek-praktek yang tidak sehat, agar memungkinkan

---

<sup>8</sup> Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: kencana, 2006, hlm. 8

ekonomi berkembang bebas guna merespon kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Partisipasi pemerintah diharapkan tampil di bidang-bidang yang amat memerlukan kelengkapan.

Keadilan ekonomi juga mengimplikasikan agar potensi-potensi ekonomi dioptimalisasikan sejauh mungkin di setiap waktu. Oleh karena segala hal diciptakan Allah untuk kemakmuran manusia, maka manusia dituntut untuk terus menerus mengikhtiarkan perbaikan ekonomi. Jika kebutuhan-kebutuhan ekonomi seseorang telah terpenuhi, kepribadiannya niscaya akan menuju saluran-saluran kreatif, intelektual dan moral, sebab manusia merupakan mesin berfikir yang bahan bakar fisiknya adalah faktor ekonomi.

Al-Qur'an sangat menekankan segi kehidupan yang bersifat material dan ekonomi. Gagasan tentang kekayaan diungkapkan dengan istilah-istilah yang positif dan dikaitkan dengan, misalnya, *khayr* (kebaikan), *fadl Allah* (karunia/anugerah Allah), *rizq* (persediaan pangan), dan lain-lain.

Kekayaan sering dikemukakan untuk direnungkan sebagai rahmat Allah yang paling nyata kepada manusia. Karena itu, seorang Muslim yang sibuk memproduksi dan mengupayakan kekayaan berarti melaksanakan suatu tindak pengabdian yang fundamental kepada Allah atau ibadah.<sup>9</sup>

Dewasa ini terdapat dua kubu teori ekonomi yang saling berlawanan, yaitu Kapitalis dan Marxis. Meski terdapat variasi-variasi dalam masing-masing kategori besar ini, namun sebenarnya mereka memegang asumsi-

---

<sup>9</sup> Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: LPPI, 2001, hlm. 68-72 dan 81

asumsi yang sama tentang manusia, masyarakat, dan kegiatan ekonomi. Keduanya yakin bahwa manusia mampu dan harus mengatur kehidupan ekonominya tanpa kendala-kendala moral apapun. Ini sangat menyimpang dari garis Islam.

Sistem ekonomi Islam harus berupaya mewujudkan keadilan ekonomi dan menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan terjadinya kerjasama ekonomi di antara individu-individu. Dengan menolak pemilahan-pemilahan kehidupan menjadi bidang sekular dan sakral, Islam menundukkan semua upaya dan aktivitas manusia di bawah pengawasan ketat secara rasional maupun spiritual. Spiritualisasi dan moralisasi kegiatan-kegiatan ekonomi individu dan kolektif tentulah akan merangsang terwujudnya kerjasama dan keadilan ekonomi. Hasil akhir dari pendekatan ini pada aktivitas ekonomi dapat memberikan kontribusi tetap bagi efisiensi, produktivitas dan stabilitas ekonomi.<sup>10</sup>

Hubungan manusia dengan Tuhan (tauhid) menempati kedudukan sentral dalam pandangan dunia Islam. Hubungan manusia dengan sesamanya dan dengan alam haruslah serasi dengan nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Allah. Tauhid mempersatukan semua kaum beriman dan menjadikan mereka satu tubuh yang saling berkait dan bersatu dalam persaudaraan, yang tunduk pada kehendak Allah. Segala yang ada, baik hidup maupun mati, melaksanakan suatu tujuan yang telah digariskan kepadanya oleh Allah. Semua makhluk saling bergantung, dan segenap makhluk bergerak karena

---

<sup>10</sup> Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005, hlm. 4



keserasian sempurna yang terdapat di antara bagian-bagiannya. Dalam al-Qur'an, Allah berfirman:

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (القمر: 49)

Artinya; "Bagi segala sesuatu, Kami telah menetapkan ukuran yang layak (baginya) (QS. Al-Qomar/54: 49).

Tauhid dalam konteks etika, menunjuk pada integrasi antara aspek-aspek spiritual dan temporal dalam eksistensi manusia. Etika merupakan hal terpenting dalam Islam. Al-Qur'an berulang kali menggunakan ungkapan ini:

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (البقرة: 25)

Artinya: Dan sampaikanlah berita baik kepada mereka yang beriman (kepada Allah) dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik" (QS. Al-Baqarah/2: 25).

Di antara dua sifat itu, yang pertama jelas menjadi prasyarat bagi yang kedua; tetapi juga akan menjadi tidak tulus dan tidak akan menjadi keimanan yang sejati tanpa yang kedua. Pendekatan Islam berupaya mengatasi problem ekonomi lebih atas dasar ajaran moralnya.<sup>11</sup>

Tauhid bukanlah sekadar tujuan (objective), tetapi pedoman untuk suatu proses dinamis, suatu hal yang sangat relevan bagi ilmu ekonomi. Ia menganjurkan penciptaan tata ekonomi yang adil dan patut guna mewujudkan kehendak Allah. Allah memiliki pengetahuan tentang tempat yang layak bagi setiap benda dalam hierarki ciptaan; dan sebagai Yang Maha Kuasa dan Maha Pencipta, Dia menempatkan setiap benda itu dalam situasi yang pas. Keadilan

---

<sup>11</sup> Achmad Ramzy Tadjoeidin, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Tiara Waca, 1992, hlm. 13

mensyaratkan "adanya pembagian" bagi sebagian ciptaan-ciptaan ini merupakan konsekuensi dari fakta bahwa posisi sentral manusia dalam penciptaan memungkinkan untuk, dalam bentuk tertentu, merusak keseimbangan alam semesta dan keseimbangan keadaan normatif manusia.

Banyak ayat al-Qur'an yang mewujudkan bahwa hanya manusia saja yang diberi kebebasan berkehendak (*free will*) dan kekuasaan untuk merusak keseimbangan yang telah ditetapkan Tuhan antara Allah dan dunia. Dari sudut pandangan Islam, rusaknya keseimbangan alam dan sosial yang dialami oleh dunia moderen dewasa ini pada dasarnya adalah rusaknya keseimbangan antara manusia dan Allah. Akibatnya, dengan menolak pelaksanaan amanah ini yang untuk itulah manusia diciptakan, manusia telah mengabaikan tanggungjawab kemanusiaannya dan terbenam ke dalam kebinatangannya. Damai di bumi damai dengan Allah adalah gagasan yang ganjil.<sup>12</sup>

Penerapan prinsip-prinsip tauhid pada sistem ekonomi menegaskan tempat manusia sebagai subjek sentral dalam pengelolaan ekonomi. Manusia, dalam proses pemanfaatan alam bagi dirinya dan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat, menurut pandangan Islam berarti melihat alam sebagai materi yang perlu, yang tanpa kehadirannya tidak mungkin ada kepatutan etis atau ketidakpatutan. Islam tidak membenarkan manusia untuk membelokkan alam dari tujuan-tujuannya, sebagaimana telah dilakukan oleh teknologi moderen; ia pun tidak boleh mencemarkan atau menguras sumber-sumber dayanya. Pemanfaatan atas alam haruslah dilakukan secara

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

bertanggungjawab. Tanggung jawab berarti bahwa tiada bagian alam yang dihancurkan, digerogoti, atau bahkan digunakan, kecuali penggunaannya bagi perwujudan tujuan Ilahi, yang merupakan pemenuhan nilai-nilai moral tertinggi dari manusia. Ini juga mengimplikasikan bahwa manusia tidak boleh mengurangi apa yang seharusnya tersedia bagi generasi-generasi mendatang, sebab perbuatan itu bertentangan dengan tujuan pokok seluruh penciptaan.<sup>13</sup>

Perilaku manusia moderen dewasa ini dalam memanfaatkan alam bersifat fungsional, mekanistik, dan sinis, sehingga mengarahkan umat manusia untuk menyalahgunakan alam yang akibatnya tidak lain kecuali tragis. Dalam proses industrialisasi dan modernisasi dewasa ini, sistem-sistem materialistik telah mengacau keseluruhan tatanan semesta. Bukan hanya jalinan sosial yang tercabik, tetapi alam yang melingkungi manusia pun telah rusak berat, terkadang tanpa kemungkinan diperbaiki. Udara tercemar, bahkan air minum terlebih lagi air laut-jadi kotor. Lalu apalagi yang akan terjadi di masa mendatang? Islam bertujuan membangun sebuah masyarakat atas dasar hubungan antara manusia dan Tuhan, berdasarkan moralitas dan keadilan sosial. Prinsip-prinsip yang dapat dipetik dari nilai-nilai Ilahiah ini diterapkan untuk mengatur sistem-sistem ekonomi di setiap tempat dan masa. Penerapan nilai-nilai ini dapat menjamin keadilan ekonomi, dan pada akhirnya akan merangsang kerjasama di antara unit-unit ekonomi dalam upaya-upaya mereka. Ayat "*Lita'arafu*" - Supaya engkau bekerjasama dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik (*al-ma'ruf*) dapat diwujudkan dalam

---

<sup>13</sup> Mustafa Edwin Nasution dkk, *op.cit.*, hlm. 9

kenyataan, jika keadilan ekonomi telah tercapai. Pendekatan Islam untuk menuju sistematisasi aktivitas ekonomi dalam tatanan sosial ini bukan hanya membuka peluang bagi kemajuan ekonomi individu dan kolektif, tetapi juga mampu mempertahankan kemajuan tersebut tanpa menimbulkan kekacauan dan perpecahan manusia. Pendekatan Islam yang langsung dan sempurna ini menghindari pengutamaan aspek tunggal dari kemampuan atas kebutuhan manusia dengan akibat menciptakan sejumlah problem sosial. Islam memandang kemajuan manusia dalam totalitasnya.

Dengan berpegang pada tauhid, prinsip-prinsip filosofis dan etika menjadi relevan bagi pedoman-pedoman ekonomi. Pedoman-pedoman ini memungkinkan manusia merumuskan tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan dan rancang-struktural untuk mengoperasionalisasikan suatu sistem ekonomi Islam.

Secara kategoris sistem ekonomi yang beroperasi dalam aktivitas ekonomi sekarang adalah sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi Islam. Karakteristik sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem kapitalis maupun asosialis. Perbedaannya tidak hanya dalam aspek normatif tetapi juga pada aspek teknis operasionalnya.<sup>14</sup>

Membahas mengenai sistem ekonomi kapitalis adalah sangat kompleks karena menyangkut berbagai aspek baik politik, kebudayaan, sosial dan perkembangan IPTEK. Sistem kapitalisme tidak bisa dilepaskan dari latar belakang kehidupan dan pandangan hidup masyarakat barat di mana sistem

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

ini lahir dan berkembang. Pandangan hidup masyarakat barat pada umumnya adalah rasionalistik, materialistik individualistik dan liberalistik. Kapitalisme sebagai suatu sistem ekonomi juga berkaitan erat dengan pandangan hidup rasionalisme, materialisme, individualisme dan liberalisme.

Ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis adalah sebagai berikut:

- a) Kebebasan memiliki harta secara perorangan:

Tiap individu bebas menggunakan sumber-sumber ekonominya menurut apa yang dikehendakinya. Serta diberi kebebasan penuh untuk menikmati manfaat yang diperoleh dari hasil produksi dan distribusi barangnya.

- b) Kebebasan ekonomi dan persaingan bebas:

Selagi tidak melanggar norma-norma masyarakat tiap individu bebas mendirikan, mengorganisir dan mengelola perusahaannya. Tiap individu bebas mengoptimalkan semua potensi ekonominya baik fisik, mental dan sumber daya lainnya menurut keinginannya.

- c) Ketimpangan ekonomi :

Pada sistem kapitalis modal memegang peranan yang strategis. Pelaku-pelaku ekonomi yang memiliki modal relatif cukup banyak akan menikmati peluang usaha yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Sebaliknya, bagi mereka yang tidak memiliki modal hanya memperoleh kesempatan usaha yang sedikit sehingga akan menimbulkan kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Imamudin Yuliadi, *op.cit.*, hlm. 72.

Dari prinsip dasar tersebut sistem kapitalis melahirkan dampak yang positif dalam perekonomian yaitu:

- a. Dapat mendorong aktivitas ekonomi secara signifikan.

Kebebasan berusaha bagi tiap individu akan mendorong kreatifitas dan aktivitas ekonomi yang mengarah pada produktifitas masyarakat.

- b. Persaingan bebas akan mewujudkan produksi dan harga produksi ke tingkat yang wajar dan rasional. Persaingan bebas antar pelaku ekonomi akan mendorong kegiatan produksi pada tahap yang rasional. Keuntungan dan tingkat harga akan tercapai pada tingkat yang wajar.

- c. Mendorong motivasi pelaku ekonomi mencapai prestasi yang terbaik.

Dorongan motivasi untuk meraih keuntungan akan memacu semangat untuk melakukan inovasi pada berbagai kegiatan ekonomi sehingga kegiatan ekonomi akan semakin efisien.<sup>16</sup>

Namun pada sisi lain sistem ekonomi kapitalis mengandung banyak kelemahan yaitu:

- a. Persaingan bebas yang tak terbatas menimbulkan gangguan dalam tatanan ekonomi antara lain penumpukan harta, distribusi kekayaan tidak merata dan lain sebagainya.

- b. Persaingan bebas memupuk semangat individualis dan mengorbankan semangat kebersamaan. Sendi-sendi kebersamaan, kegotong-royongan menjadi sesuatu yang langka. Kepentingan individu untuk memperoleh keuntungan akan menimbulkan perpecahan di tengah-tengah masyarakat.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 72.

- c. Distorsi pada nilai-nilai moral yaitu saling kerja sama, gotong royong, kasih sayang dan lain sebagainya.
- d. Menimbulkan pertentangan sosial antar kelas dalam masyarakat, misal antara majikan dan karyawan, antara pemilik lahan pertanian dan penggarap, dan lain sebagainya. Karena masing-masing berdiri atas dasar kepentingan individu yang saling bertentangan satu sama lain.
- e. Akan melahirkan sikap hidup yang tidak memperhatikan nilai-nilai moral sosial dan agama.

Budaya potong kompas, korupsi, kolusi menjadi bagian dari kegiatan bisnisnya. Produksi barang dan distribusi pendapatan hanya akan dinikmati oleh sebagian kecil anggota masyarakat. Sementara sebagian besar pelaku ekonomi akan menerima bagian yang lebih kecil dari produksi barang tersebut.<sup>17</sup>

Dalam kaitannya dengan sistem ekonomi sosialisme, bahwa persoalan mengenai sosialisme merupakan suatu isu lama sekaligus baru. Dikatakan isu lama jika diamati dari segi timbulnya agama-agama yang menyinggung masalah keadilan, hak asasi manusia, cinta kasih, kedamaian dan sebagainya. Namun Juga dikatakan sebagai masalah baru jika ditinjau dari suatu fenomena sosial yang merupakan reaksi dari dampak negatif akibat revolusi Perancis dan revolusi industri yang melahirkan perubahan dalam struktur kehidupan masyarakat. Sosialisme merupakan produk dari revolusi Perancis dan revolusi industri di Eropa pada akhir abad ke-18 dan akhir abad ke-19.

---

<sup>17</sup> Eko Suprayitno, *op.cit.*, hlm. 4

Prinsip utama sosialisme menurut Emille Durkheim bukanlah semata-mata bahwa produksi hendaknya dipusatkan di tangan negara, tetapi peranan negara harus seluruhnya merupakan peranan ekonomi.

Prinsip dasar sistem ekonomi sosialisme adalah sebagai berikut:

- Kepemilikan harta dikuasai oleh negara, rantai ekonomi produksi, distribusi, perdagangan dan industri menjadi monopoli negara atau masyarakat keseluruhan. Individu tidak diberi peluang untuk memiliki harta atau memanfaatkan produksi.
- Setiap individu memiliki kesamaan kesempatan dalam melakukan aktivitas ekonomi. Setiap individu akan memperoleh barang kebutuhan menurut keperluan masing-masing.
- Untuk mencapai suatu tatanan ekonomi yang ketat diberlakukan disiplin politik yang tegas dan keras. Negara mengambil alih semua aktivitas ekonomi dan kebebasan ekonomi dihapuskan sama sekali.

Kebaikan sistem ekonomi sosialis yaitu :

- Tiap warga negara dipenuhi kebutuhan pokok minimalnya baik sandang, pangan dan papan. Tiap individu akan mendapatkan pekerjaan dan perlindungan terhadap warga yang cacat fisik dan mental.
- Semua proyek pembangunan dilaksanakan berdasarkan perencanaan ekonomi oleh negara.
- Semua rantai produksi dikuasai oleh negara dan dikelola oleh negara dan keuntungan akan kembali kepada masyarakat luas.

Kelemahan sistem ekonomi sosialis yaitu :



- Posisi tawar menawar pelaku ekonomi individu sangat terbatas sehingga terpaksa dikorbankan kebebasan pribadi terhadap harta miliknya.
- Sistem ini mengabaikan sepenuhnya sifat mementingkan pribadi dan menghambat kebebasan berpikir dan bertindak. Buruh dijadikan sebagai mesin produksi untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat.
- Orientasi kehidupan diarahkan sepenuhnya untuk mencapai target pembangunan ekonomi dan mengabaikan aspek kehidupan lainnya. Aspek moral terabaikan yang berakibat muncul polarisasi di tengah-tengah masyarakat. Kekuasaan negara berada di tangan orang-orang yang tidak profesional yang melahirkan praktek-praktek penindasan, kezaliman dan balas dendam yang lebih berbahaya daripada dalam sistem ekonomi kapitalis.

Ti adanya penghargaan terhadap kreativitas individu menimbulkan sikap apatisme dan kehilangan semangat hidup. Pemegang birokrasi menjadi tumpuan bagi para pelaku ekonomi sehingga mendorong munculnya praktek KKN untuk memudahkan mendapat fasilitas dari negara. Maka tidak mengherankan jika praktek KKN sangat menonjol pada negara yang menganut sistem ekonomi sentralistis.<sup>18</sup>

Dalam hubungannya dengan sistem ekonomi Islam, bahwa Islam sebagai suatu sistem kehidupan manusia mengandung suatu tatanan nilai dalam mengatur semua aspek kehidupan manusia baik menyangkut sosial/ politik, budaya, hukum, ekonomi dsb. Syariat Islam mengandung suatu

---

<sup>18</sup> Achmad Ramzy Tadjoeidin, *op.cit.*, hlm. 13

tatanan nilai yang berkaitan dengan aspek akidah, ibadah, akhlaq dan muamalah. Pengaturan sistem ekonomi tidak bisa dilepaskan dengan syariat Islam dalam pengertian yang lebih luas.

Sistem ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar sebagai berikut:

- Individu mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk berpendapat atau membuat suatu keputusan yang dianggap perlu, selama tidak menyimpang dari kerangka syariat Islam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang optimal dan menghindari kemungkinan terjadinya kekacauan dalam masyarakat.
- Agama Islam mengakui hak milik Individu dalam masalah harta sepanjang tidak merugikan kepentingan masyarakat luas.
- Islam juga mengakui bahwa tiap individu pelaku ekonomi mempunyai perbedaan potensi yang, berarti juga, memberikan peluang luas bagi seseorang untuk mengoptimalkan kemampuannya dalam kegiatan ekonomi. Namun hal itu kemudian ditunjang oleh seperangkat kaedah untuk menghindari kemungkinan terjadinya konsentrasi kekayaan pada seseorang atau sekelompok pengusaha dan mengabaikan kepentingan masyarakat umum.
- Islam tidak mengarahkan pada suatu tatanan masyarakat yang menunjukkan adanya kesamaan ekonomi tapi mendukung dan menggalakkan terwujudnya tatanan kesamaan sosial. Kondisi ini mensyaratkan bahwa kekayaan negara yang dimiliki tidak hanya

dimonopoli oleh segelintir masyarakat saja. Di samping itu, dalam sebuah negara Islam tiap individu mempunyai peluang yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan melakukan aktivitas ekonomi.

- Adanya jaminan sosial bagi tiap individu dalam masyarakat. Setiap individu mempunyai hak untuk hidup secara layak dan manusiawi. Menjadi tugas dan kewajiban negara untuk menjamin setiap warga negaranya dalam memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Instrumen Islam mencegah kemungkinan konsentrasi kekayaan pada sekelompok kecil orang dan menganjurkan agar kekayaan terdistribusi pada semua lapisan masyarakat melalui suatu mekanisme yang telah diatur oleh syariat.
- Islam melarang praktek penimbunan kekayaan secara berlebihan yang dapat merusak tatanan perekonomian masyarakat. Untuk mencegah kemungkinan munculnya praktek penimbunan Islam memberikan sanksi yang keras kepada para pelakunya.
- Islam tidak mentolerir sedikit pun terhadap setiap praktek yang asosial dalam kehidupan masyarakat seperti minuman keras, perjudian, prostitusi, peredaran pil ecstasy, pornografi, night club, discotique dan sebagainya.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Mustafa Edwin Nasution dkk, *op.cit.*, hlm. 9